

ABSTRAK

Perkembangan pergaulan dalam bernegara tidak hanya menimbulkan pengaruh yang bersifat positif tetapi juga negatif. Pengaruh negatif ini harus dihadapi dan bahkan memerlukan pencegahan atau penanggulangan melalui instrumen hukum. Pengaruh yang bersifat positif sangat menunjang kelangsungan pemerintahan negara untuk mensejahterakan warganya sebagai mana yang di amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Pengaruh yang bersifat negatif merupakan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh negara untuk mencapai tujuannya. misalnya, kejahatan di bidang narkoba, korupsi dan gangguan keamanan negara (terorisme/pemberontakan).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Implementasi Rehabilitasi Tersangka pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga dapat mengetahui apa saja hambatan yang di peroleh serta solusi yang di berikan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng. Sedangkan manfaat dari penelitian ini untuk memberi wawasan bagi pembaca terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan penerapan sanksi Rehabilitasi Tersangka Narkotika di Tinjau dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penelitian ini adalah deskriptif analisi yaitu penilititan yang memaparkan berbagai data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaksi dengan tahap-tahap analisis data adalah mengumpulkan data, reduksi data, analisis dan penyajian data, verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Rehabilitasi Tersangka pecandu dan penyalahgunaan Narkotika di Jawa Tengah dapat melalui dua cara yaitu dengan mekanisme Rehabilitasi dengan proses assessment dan mekanisme Rehabilitasi dengan proses pengadilan. Serta masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa Rehabilitasi bagi pengguna Narkotika semua biayanya di tanggung oleh Pemerintah atau gratis. Sedangkan upaya solusi yang di lakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat daerah Jawa Tengah.

Saran yang diberikan agar adanya Kerjasama yang baik antara Instansi penegak Hukum baik dari Kepolisian, Panti Rehabilitasi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN), yaitu harus adanya pengawasan yang ketat dalam proses Penyidikan ataupun assessment yang di lakukan oleh pihak Kepolisian, Dokter, dan Psikolog agar tidak terjadi manipulasi terhadap hasil assessment yang sangat berpengaruh terhadap seorang pecandu dan penyalahgunaan Narkotika yang dimana menentukan apakah seorang pecandu dan penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan Rehabilitasi atau di masukan ke dalam penjara.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Tersangka Narkotika, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

ABSTRACT

The development of social relations in the state does not only cause positive but also negative influences. This negative influence must be faced and even requires prevention or countermeasures through legal instruments. The positive influence greatly supports the continuity of the state government for the welfare of its citizens as mandated in the Preamble to the 1945 Constitution (UUD 1945). Negative influences are obstacles or obstacles faced by the state to achieve its goals. for example, crimes in the field of narcotics, corruption and state security disturbances (terrorism/rebellion).

The problem in this study is to find out the process of implementing the rehabilitation of suspected addicts and victims of narcotics abuse so that they can find out what obstacles are obtained and the solutions provided by the Directorate of Drug Investigation of the Central Java Police. Meanwhile, the benefits of this research are to provide insight for readers to the development of legal science in general and the development of the application of sanctions for the rehabilitation of Narcotics Suspects in Review of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

This research is descriptive analysis, namely research that describes various data obtained from observations and interviews, while the data collection methods used in this study are observation, interviews. The data analysis method in this study uses the interaction method with the stages of data analysis, namely collecting data, reducing data, analyzing and presenting data, and verifying data.

The results showed that the implementation of the rehabilitation of suspected addicts and narcotics abusers in Central Java can be done in two ways, namely the rehabilitation mechanism with the assessment process and the rehabilitation mechanism with the court process. And there are still many people who do not know that all costs for Rehabilitation for Narcotics users are borne by the Government or free of charge. Meanwhile, the solution efforts carried out by the Directorate of Drug and Drug Investigation of the Central Java Police are conducting socialization to the people of the Central Java region.

Suggestions are given for good cooperation between law enforcement agencies from the Police, Rehabilitation Institutions, and the National Narcotics Agency (BNN), namely that there must be strict supervision in the investigation or assessment process carried out by the police, doctors, and psychologists so that there is no manipulation of the results of the assessment which is very influential on an addict and narcotics abuser which determines whether an addict and narcotics abuser can be rehabilitated or put in prison.

Keywords : *Rehabilitation, Narcotics Suspect, Law Republic of Indonesia Number 35 Year 2009.*